

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya Pandemi Global *Covid-19* menciptakan tantangan terhadap segi pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah upaya negara-negara di kawasan ASEAN dalam mencapai Pembangunan ASEAN baik dalam hal perdagangan maupun investasi. Adapun, pertumbuhan ekonomi yang sangat mengandalkan bidang pariwisata, perdagangan global serta rantai pasokan mengalami penurunan yang drastis di saat Pandemi *Covid-19* menghantam dunia.

Mobilitas manusia, barang dan jasa menjadi terbatas, situasi ini membuat negara-negara di Asia Tenggara menganggap dalam rangka memperoleh dan mengakses data, barang dan jasa perlu adanya transformasi digital serta pengendalian teknologi baik dalam lingkup pemerintahan maupun sektor-sektor ekonomi.

Melalui adanya kebutuhan tersebut di era *Covid-19* secara global membawa setiap pemerintah di negara-negara ASEAN memasuki era transformasi digital yang sangat mengandalkan kemajuan teknologi bahkan dalam mengoperasikan penyediaan layanan serta sektor-sektor publik diimplementasikan dan dikembangkan di negara-negara kawasan ASEAN sejak sebelum *Covid-19*, namun *Covid-19* sebetulnya menjadi

titik balik atau mendorong kuat negara-negara di kawasan ASEAN untuk mempercepat transformasi digital tersebut.

Sebetulnya transformasi digital ekonomi juga ditegaskan dan difokuskan ASEAN, misalnya dengan mengacu pada tiga pilar utama ASEAN salah satunya pilar ekonomi melalui *AEC Blueprint*.

AEC merupakan sebuah tujuan terhadap integrasi ekonomi kawasan dalam rangka untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi untuk meningkatkan daya saing dengan menerapkan mekanisme-mekanisme ekonomi baru dan terkini, mempercepat integrasi kawasan terutama dalam sektor-sektor penting, memfasilitasi para pelaku bisnis, tenaga kerja terampil serta mempertahankan mekanisme institusional ASEAN.

Integrasi kawasan ekonomi melalui AEC itu sendiri juga membahas mengenai pengembangan transaksi elektronik terutama hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan internet dan keamanan atas transaksi maupun pembayaran elektronik, dimana beberapa upaya telah dilakukan salah satunya ialah penerapan ICT (*Information and Communication Technology*), pengadaan dan penyebaran pelatihan-pelatihan melalui ASEAN CERT Incident Drills dengan pengadaan dialog-dialog ASEAN serta dorongan terhadap negara-negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi dalam ASEAN MRA yang berfokus pada peralatan telekomunikasi (ASEAN Secretariat, 2008).

Selain itu melalui sarana integrasi ekonomi AEC juga dihasilkan kerangka kerja dengan tujuan untuk membahas Perjanjian Kerangka Kerja Digital Ekonomi ASEAN

atau dikenal dengan Negosiasi DEFA yang sudah disepakati dalam Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR). Penyelenggaraan Negosiasi DEFA ini sudah diperbincangkan pada tahun 2021.

Tentunya, negosiasi DEFA ini berfokus atau mengacu pada beberapa hal seperti merefleksikan aturan-aturan berbasis *AEC Blueprint* untuk menciptakan digital ekonomi kawasan yang inklusif terhadap agenda pembangunan AEC yang lebih luas, serta tentunya mengacu pada percepatan transformasi digital yang inklusif sebagai tujuan untuk pemulihan komprehensif pasca *Covid-19* dan lain sebagainya (ASEAN Secretariat, 2023).

Pada dasarnya, tujuan AEC melalui *Blueprint 2025* untuk memastikan sektor finansial yang inklusif dan stabil yang mana juga menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi kawasan terutama di ASEAN.

Adapun terkait dengan visi tahun 2024 untuk integrasi sektor finansial ialah mencakup tiga tujuan strategis yaitu integrasi finansial, inklusi finansial dan stabilitas finansial dengan berdasarkan tiga lintas sektor atau area baik itu Liberalisasi Neraca Modal, Sistem Pembayaran dan Penguatan Kapasitas.

Adapun langkah-langkah strategis dari tujuan integrasi finansial ini mencakup, yang pertama penguatan terhadap perdagangan dan investasi dari intra-ASEAN untuk menciptakan pasar-pasar asuransi yang terintegrasi, pasar modal yang terkoneksi serta meningkatkan peran bidang perbankan terutama bank nasional atau pribumi di ASEAN tentunya dengan syarat utama ialah menurunkan biaya dan semacamnya.

Kemudian yang kedua ialah mendorong adanya inklusi finansial terutama fokus

terhadap produk-produk finansial dan layanan yang harus dikembangkan mendorong penyebarannya dalam komunitas yang lebih luas tentunya yang dimaksud ialah pengembangan dari bisnis-bisnis lokal seperti para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Strategi terhadap tujuan AEC *Blueprint* 2025 terutama dalam aspek inklusi digital ini tentunya akan sangat mendukung dan meningkatkan eksistensi UMKM. Tujuan tersebut diupayakan melalui kolaborasi-silang antara beberapa kelompok kerja yang telah dibentuk di ASEAN.

Secara spesifik, upaya tersebut akan membantu memfasilitasi UMKM dalam mengeluarkan kredit biro untuk meningkatkan akses kredit terhadap bisnis UMKM sehingga ini akan membantu memfasilitasi keuangan atau finansial dari bisnis UMKM tersebut (ASEAN Secretariat, 2015).

Secara spesifik, terdapat beberapa transformasi digital di kawasan ASEAN dengan adanya *Covid-19* yaitu mulai dari sektor kesehatan publik untuk mendukung program-program layanan kesehatan dan respon untuk *Covid-19* baik terkait pengawasan populasi, identifikasi kasus serta pelacakan kontak atau secara spesifik yaitu pengawasan epidemiologi digital, identifikasi kasus yang cepat, gangguan terhadap transmisi komunitas, komunikasi publik dan klinik kesehatan yang telah menggunakan alat digital dan teknologi baik itu aplikasi di *smartphone*, sosial media misalnya dengan pengendalian *Halodoc* di Indonesia, *chat-bot*, tele-konferensi dan lain sebagainya.

Kemudian dari segi sistem pelacakan di ASEAN dengan munculnya

PeduliLindungi di Indonesia, Morchana di Thailand dan *MySejahtera* di Malaysia yang fokus terhadap pelayanan kesehatan dan penyediaan informasi yang sangat cepat serta konektivitas antar para pegawai kesehatan masyarakat dengan individu yang terkena dampak.

Adapun, dari segi kebijakan dan perubahan legislatif juga melakukan adaptasi secara digital seperti beberapa kebijakan domestik yang telah dilegalkan masing-masing negara seperti Filipina dengan kebijakan “Notarisasi melalui konferensi-video” dan panduan-panduan bekerja dari rumah melalui *National Privacy Commission* (NPC) oleh Buletin PHE, begitu juga Singapura melalui “*Temporary Measures Act 2020*” atau pelaksanaan rapat umum organisasi dan pemerintah melalui kontak digital dan Thailand melalui “*Royal Decree on Teleconference through Electronic Means B.E. 2563*” tahun 2020 yang memperkenalkan rapat para pemegang saham dan pemerintah secara *online*.

Lebih jauh lagi, inovasi-inovasi digital tambahan seperti mempertahankan “*Hawkers Go Digital*” yang sudah berdiri sebelum *Covid-19* untuk mendukung *ASEAN Roadmap 2025*, sebagai sistem pembayaran digital terpadu yang dikelola oleh pemerintah di Singapura yang mana memberikan efektivitas dan efisiensi terhadap bisnis lokal dan membantu para UMKM terkait.

Sama halnya dengan Thailand dalam rangka mendukung *Roadmap 2025* dengan mendirikan “*Make in Viet Nam*” dengan tujuan merangkul sektor atau perusahaan teknologi di Vietnam untuk mempromosikan produk teknologi Vietnam serta bertransformasi kepada kewirausahaan digital.

Beberapa kewirausahaan digital atau perusahaan global digital di ASEAN seperti beberapa *startup (unicorns)* di Indonesia yaitu Blibli, Gojek, Bukalapak dan Tokopedia, selain itu Singapura (*Carousell, Carro, Sea Limited* ataupun *Shopee*), Malaysia (*Carsome, GRAB*), Thailand (*Flash Group*) dan sebagainya juga dinilai berpotensi terhadap ekonomi di ASEAN (ASEAN Secretariat, 2023).

Meskipun, masih terdapat kesenjangan angka terkait perbandingan negara-negara di kawasan ASEAN dari segi transformasi digital. Salah satu contoh perbandingan yaitu *Platform Digital* antara Indonesia dengan Singapura. Berdasarkan angka ADII (*ASEAN Digital Integration Index*) dari pilar Inovasi dan Kewirausahaan, Indonesia menunjukkan angka 48.81 yang mana masih di bawah Singapura yang menunjukkan angka 71.08, namun performa Indonesia hampir mendekati pada performa regional dengan bagaimana Indonesia menghasilkan beberapa *unicorns/startups* diantaranya Gojek, Tokopedia dan Traveloka yang diperkirakan *starts-ups* naik hingga 20-30%.

Singapura dianggap memiliki skor yang lebih tinggi oleh karena faktor ekonomi yang terbuka dan kemudahan berbisnis sehingga memberikan peluang bagi para perusahaan global yang menyebabkan adanya pertukaran teknologi dan wawasan, tetapi juga menarik investasi (ASEAN Secretariat, 2021).

Terlepas dari persoalan tersebut, hal ini membuktikan bahwa keduanya sama-sama berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di bidang tersebut atau Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN khususnya perwujudan AEC di ASEAN. Dari berbagai sektor yang sudah dipaparkan, sektor perdagangan terutama di bidang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling disoroti akan transformasinya sebelum memasuki era *Covid-19*.

UMKM memainkan peran penting dan berkontribusi dengan jumlah presentase yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, dimana angka yang ditunjukkan ialah sebesar 97% dari komunitas bisnis dan 97% dari tenaga kerja di tahun 2010 hingga 2019 (Raharjo, 2023).

Mengenai kontribusi angka tersebut menurut *United Nations Development Programme*, UMKM di ASEAN mencakup 97% sektor swasta, 85% tenaga kerja, 45% PDB Regional dan 10-30% ekspor (UNDP Insurance & Risk Finance Facility, 2024).

Sedangkan menurut data ASEAN sendiri bahwa secara regional, UMKM telah berkontribusi sebesar 85% terhadap tenaga kerja, 44.8% terhadap PDB serta 18% terhadap ekspor-ekspor nasional (ASEAN) Di sisi lain, UMKM menjadi faktor penting terhadap devisa dan keseimbangan perdagangan suatu negara.

Munculnya *Covid-19* memberikan tantangan pembatasan ruang gerak terutama ketika negara-negara di seluruh dunia mulai menerapkan kebijakan yang dikenal dengan “*lockdown*” ataupun pembatasan ruang gerak. Di sisi lain ketika *Covid-19* berlangsung dan menjadi penghalang bagi setiap individu melakukan aktivitas secara normal sekaligus membatasi ruang gerak mereka, inovasi penggunaan media digital pada akhirnya menjadi solusi.

Pada saat itu terbilang bahwa, secara drastis terjadi peningkatan penggunaan media digital, yang mana setiap aktivitas mengalami pengalihan dengan mulai mengandalkan media digital termasuk dalam bidang kesehatan maupun aktivitas

bisnis.

Dari segi kesehatan, tindakan komunikasi, konsultasi, identifikasi penyakit dan klinik kesehatan beralih dengan menggunakan media digital seperti fitur *chat-bot*, telekonferensi bahkan untuk pembelian obat-obatan dan sebagainya bisa dilakukan melalui penggunaan media digital.

Dari segi aktivitas bisnis juga, masyarakat lebih sering menggunakan aplikasi pemesanan makanan secara *online*, pembelian bahan dasar masak maupun pembelian kebutuhan dan barang-barang lainnya melalui aplikasi digital. Sehingga banyak pebisnis di sektor UMKM baik yang menjual makanan, kebutuhan pokok, barang dan sebagainya mulai mendaftarkan bisnis mereka dalam aplikasi *online* seperti *marketplace* atau aplikasi *e-commerce* yang sudah mudah diakses oleh setiap kalangan masyarakat terutama di negara-negara di ASEAN.

Ketika dunia perlahan-lahan mulai pulih kembali dan saat masyarakat mulai bisa menjalankan aktivitas secara normal, pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan dan terdapat banyak hal baru yang mengalami perubahan termasuk perubahan dengan beralih kepada pengendalian sistem digital termasuk aktivitas atau sektor bisnis, perusahaan-perusahaan maupun untuk tingkat sejenis sektor UMKM sekalipun dalam penerapan transaksi, misalnya dengan menambahkan metode transaksi keuangan digital.

Dengan adanya *Covid-19*, sebetulnya lebih membangkitkan kesadaran bahwa transformasi keuangan digital merupakan sesuatu yang signifikan dan perlu diterapkan serta ditingkatkan terutama untuk sektor UMKM terlebih khusus yang belum

menambahkan inovasi terkait keuangan digital atau metode transaksi digital sebagai metode pembayaran. Selain itu, sebetulnya penggunaan keuangan digital dapat memberikan kemudahan transaksi dan meningkatkan persaingan bisnis di sektor UMKM.

Secara spesifik, keuangan digital memudahkan transaksi dengan memberikan efektivitas bagi sektor UMKM yang mana dapat berdampak pada efisiensi, kecepatan, biaya yang berkurang dan mengamankan jasa perdagangan dalam produksi dan pemasaran.

Maka perlu adanya transaksi keuangan digital melalui metode digital terutama dengan mengetahui bahwa, keuangan digital memberikan layanan keuangan atau metode dimana masyarakat tidak perlu mempunyai ataupun membuka rekening bank untuk melakukan transaksi dengan metode digital tersebut. Di sisi lain, hal ini juga pada akhirnya memberikan potensi dalam mengangkat sektor UMKM yang kemudian akan meningkatkan kompetisi bisnis sektor UMKM.

Sektor UMKM di ASEAN menjadi sorotan bukan hanya dengan melihat bagaimana sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDB ASEAN, tetapi juga dengan melihat bahwa keunggulan sektor ini memberikan potensi untuk tetap bertahan dan berkembang melalui pengendalian media terlebih khusus keuangan digital.

Jika ditelusuri, sebetulnya masih terdapat banyak UMKM yang cenderung beroperasi secara tradisional dan kurang mengandalkan sistem digital baik itu untuk mendaftarkan bisnis mereka dalam “*marketplace*” atau aplikasi *e-commerce* bahkan menyediakan metode transaksi digital sebagai metode pembayaran.

Selebihnya, negara-negara ASEAN memang sudah menyadari akan pengalihan atau transformasi digital tersebut terutama dalam sektor perdagangan sebelum adanya wabah *Covid-19*. Sebelum *Covid-19*, negara-negara di ASEAN banyak yang sudah menerapkan atau memberlakukan keuangan digital atau metode transaksi secara digital di tengah-tengah proses atau upaya dalam merealisasikan Rancangan Aksi Strategis sesuai dengan *AEC Blueprint*.

Hal ini dilihat dari bagaimana negara-negara di ASEAN mulai mengembangkan bisnis maupun pasar di bidang ekonomi digital seperti yang bisa dilihat dari beberapa bisnis UMKM yang kemudian berkembang menjadi bisnis *e-commerce* hingga menjadi bisnis *startups* maupun *unicorns*.

Di bawah pemerintahan Joko Widodo dalam dua periode, diplomasi Indonesia memang lebih diarahkan kepada diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi juga pada akhirnya menjadi bagian penting dari agenda Kementerian Luar Negeri Indonesia di masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia (Margiansyah, 2020).

Tujuan dari Joko Widodo pada saat itu dengan menginisiasikan diplomasi ekonomi ialah untuk mendorong terwujudnya industrialisasi dan hilirasi di Indonesia melalui rancangan "*Making Indonesia 4.0*" yang dikeluarkannya (Fukuoka, 2019).

Adapun seiring masa pemerintahannya dalam rangka mensukseskan industrialisasi di Indonesia, ekonomi digital juga dianggapnya sebagai kekuatan baru yang dapat meningkatkan daya saing dan kompetisi ekonomi. Maka dari itu, ekonomi digital juga menjadi elemen penting dan fokus dari kebijakan domestik Indonesia serta menjadi inisiasi Joko Widodo dalam diplomasi ekonomi Indonesia.

Terkait hal ini, terdapat beberapa rancangan untuk mendukung penerapan ekonomi digital seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan 2020-2024, Visi Indonesia 2045 hingga pada pemilihan umum tahun 2019, Joko Widodo menyampaikan pernyataan visi dan misi Jokowi-Amin yang berkaitan dengan ekonomi digital.

Dalam lingkup internasional, Joko Widodo menyampaikan kepentingan Indonesia dalam pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Osaka, Jepang berkaitan dengan digital ekonomi dan inklusivitas yang diharapkan dapat mengatasi kesenjangan atau ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di antara negara-negara termasuk juga isu inklusivitas.

Melalui pertemuan dengan setiap petinggi negara G20, Joko Widodo berkesempatan untuk mengajukan usulan IDEA (*Inclusive Digital Economy Accelerator Hub*) sebagai inisiatif Indonesia. IDEA dirancang sebagai tempat atau forum bagi sektor bisnis UMKM maupun *unicorn* anggota G20 untuk bersama mengurus, mengelola serta berbagai pengalaman model bisnis digital (Margiansyah, 2020).

Komitmen Indonesia dalam transformasi keuangan digital terpancar melalui Presidensi KTT G20 Indonesia 2022. Sebelumnya, Indonesia bersama dengan empat negara ASEAN lainnya yaitu Thailand, Malaysia Singapura, Filipina dan Vietnam telah menyepakati kerja sama melalui kerangka kerja dimana RPC ini menjadi komitmen negara-negara ASEAN untuk mendorong kesuksesan ekonomi digital dan inklusivitas keuangan di kawasan ASEAN.

Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang mengupayakan rancangan RPC ini terealisasi terutama ketika Indonesia memperoleh kesempatan untuk menjadi tuan rumah serta memimpin KTT *G20* di tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga sudah menjalin kerja sama bilateral terkait sistem interoperabilitas atau pembayaran digital terinterkoneksi dengan Thailand pada bulan Agustus 2022 sebelum KTT *G20* berlangsung di bulan November (Pravitasari, 2024).

Keberhasilan tersebut semakin meningkatkan semangat dan kepercayaan diri Indonesia dalam membawa pencapaian ini dan menjadikannya topik dalam pertemuan KTT *G20* yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dan ini akan menjadikan kesempatan dan peluang besar bagi Indonesia sendiri.

Dalam menjadi tuan rumah *G20*, Indonesia mengangkat inisiasi mengenai sistem pembayaran terinterkoneksi digital secara lintas batas. Usulan Indonesia memperoleh respon positif bagi negara-negara KTT *G20*, yang mana pada akhirnya berhasil menghasilkan kesepakatan bersama oleh para pemimpin KTT *G20* melalui “*G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments*”.

Selain itu, Indonesia juga berhasil mengajak negara-negara ASEAN yang berkomitmen dalam rancangan sistem pembayaran terinterkoneksi tersebut untuk menandatangani perjanjian atau *MoU* implementasi RPC pada pertemuan *G20* di Bali, Indonesia tahun 2022 (Azka, 2023).

Komitmen Indonesia tersebut diteruskan dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023, Indonesia mengangkat visi dan misi yang tercermin dalam “*ASEAN Matters: Epicentrum of*

Growth".

Dalam mewujudkan visi dan misi dari tema yang diangkat, salah satu aspek penting yang juga disoroti oleh Indonesia ialah misi untuk mempercepat transformasi digital ekonomi dan meningkatkan sektor keuangan yang stabil. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

Adapun, terkait hal tersebut Indonesia melalui KTT ASEAN yang ke-42 tepatnya pada tanggal 5-7 September 2023 yang berlangsung di Labuan Bajo juga menfokuskan agenda pembahasan terkait konektivitas transaksi regional beserta mata uang lokal di kawasan ASEAN. Indonesia bermaksud menjaga dan meningkatkan kestabilan nilai tukar negara-negara ASEAN terutama terhadap Dolar AS dan tidak lagi bergantung pada nilai tukar ataupun bahkan penggunaan AS Dolar.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, Indonesia mengajukan pengutamaan mata uang lokal dalam aktivitas transaksi maupun sistem pembayaran secara regional yang terhubung satu sama lain di kawasan ASEAN atau secara lintas batas melalui penggunaan QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) (KOMINFO, 2023).

Agenda diskusi KTT ASEAN yang ke-42 dengan mengangkat soal pengajuan rancangan-rancangan dalam mempertahankan mata uang lokal serta meningkatkan transaksi digital atau konektivitas pembayaran secara lintas batas di kawasan ASEAN merupakan suatu komitmen ASEAN dalam sektor ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama di bidang ekonomi digital.

Komitmen dalam sektor ekonomi tersebut dikuatkan dan didorong oleh adanya

kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dengan tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” (Siborutorop, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN dalam sektor perdagangan terutama bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya akan hadirnya *unicorns/startups* Indonesia seperti Gojek kemudian Tokopedia, dan Traveloka yang berkembang pesat berdasarkan data perhitungan dari ADII atau data indeks Integrasi Digital ASEAN.

Pada akhirnya membawa Indonesia menyadari seiring terjadinya *Covid-19* akan pentingnya dorongan transformasi keuangan digital terhadap UMKM yang tersebar di Indonesia terutama kesadaran akan inklusi keuangan melalui keuangan maupun transaksi digital.

Indonesia melalui Bank Indonesia yang sebetulnya sudah mengeluarkan transaksi atau pembayaran digital yang dikenal dengan QRIS pada pertengahan Agustus 2019 di Jakarta, namun implementasi QRIS mulai secara benar dan lancar terimplementasikan di awal tahun 2020 serta mulai digunakan oleh para aktor UMKM saat wabah *Covid-19* menyebar dan selebihnya membawa penurunan penjualan terhadap bidang tersebut (Hartono, 2023).

Secara spesifik, sistem pembayaran digital terinterkoneksi atau secara lintas

batas tersebut sudah menjadi komitmen dari lima negara ASEAN meliputi Malaysia, Thailand, Filipina serta Singapura sebagai pembayaran lintas batas menggunakan Kode QR ataupun dikenal dengan *E-Wallet*.

Di sisi lain, Indonesia ingin mendorong komitmen tersebut terlaksana baik dalam tingkat regional di ASEAN maupun dalam tingkat internasional seperti KTT G20. Adapun, dalam upaya Indonesia mengimplementasikan *QRIS Cross-Border* di ASEAN, ternyata sekaligus juga mempromosikan transaksi mata uang lokal sebagai salah satu dari metode pembayaran di kawasan ASEAN tanpa lagi mengandalkan pada nilai dolar AS (KOMINFO, 2023).

Implementasi dari *QRIS Cross-Border* menjadi salah satu misi atau tujuan Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023 untuk mempertahankan transaksi mata uang lokal melalui transaksi digital di kawasan ASEAN. Dengan mengetahui informasi tersebut tentunya memunculkan pertanyaan yang perlu diulas untuk melihat dan mengetahui hal-hal berikut ini,

- 1.) Bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam menjadikan *QRIS Cross-Border* sebagai transaksi digital di kawasan ASEAN?
- 2.) Mengapa penggunaan *QRIS Cross-Border* akan meningkatkan keunggulan Indonesia di kawasan ASEAN dan sektor ekonomi nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.) Membahas strategi dan proses diplomasi Indonesia menuju implementasi *QRIS Cross-Border* kawasan ASEAN
- 2.) Menganalisis alasan penggunaan *QRIS Cross-Border* untuk meningkatkan keunggulan atau daya saing Indonesia di kawasan ASEAN demi peningkatan ekonomi nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis, akademik maupun usulan terhadap implementasi kebijakan secara domestik oleh pemerintah terutama di Indonesia. Secara praktis, tesis ini memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Hubungan Internasional UPH.

Kemudian secara akademik, penulis melihat bahwa ketika dalam proses mencari sumber atau referensi artikel mengenai implementasi *QRIS Cross-Border* sebagai transaksi digital di kawasan ASEAN ternyata belum banyak dibahas atau bisa dikatakan topik atau isu ini hanya memiliki sedikit literatur atau informasi yang terbatas.

Pada akhirnya dari segi kebijakan, melalui adanya penelitian ini memiliki kontribusi terhadap implementasi kebijakan secara domestik terutama regional. Dengan adanya penelitian terkait topik *QRIS Cross-Border* yang diperkenalkan Indonesia untuk menjadi transaksi digital di kawasan ASEAN memberikan masukan

pada pemerintah untuk lebih memperhatikan implementasi QRIS di Indonesia terutama dalam menerapkan aturan dan perlindungan siber yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini akan fokus pada latar belakang dari topik ini, permasalahan penelitian yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian dan tentunya manfaat dari penelitian atau kontribusi penelitian ini baik secara praktis, akademik maupun dari segi kebijakan.

Bab II : Pada bagian ini akan diawali dengan penjelasan mengenai tinjauan pustaka, selanjutnya bagian ini akan melakukan pembahasan yang lebih mendalam melalui penguraian poin-poin mulai dari sejarah diplomasi Indonesia di kawasan ASEAN, respon dan antusiasme negara-negara ASEAN terhadap transaksi digitalisasi pasca-Covid 19 serta respon dan antusiasme Indonesia terkait keuangan atau transaksi digitalisasi sebelum dan pasca-Covid 19.

Bagian ini juga akan langsung berfokus pada perumusan masalah atau analisis dan pembahasan mengenai kedua pertanyaan penelitian melalui penguraian poin-poin. Adapun, aspek yang akan dibahas ialah seperti peran diplomasi Indonesia yang langsung berkaitan dengan implementasi *QRIS Cross-Border* di ASEAN. Pada akhirnya bab ini akan diakhiri dengan teori atau konsep dalam Hubungan Internasional yang digunakan dan relasinya dengan topik yang diambil.

Bab III : Bagian ini akan langsung berfokus untuk membahas 4 esensi dari metode penelitian yaitu mulai dari pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada bagian pendekatan penelitian akan dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini apakah itu pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan spesifikasi dari metode berdasarkan pendekatan yang diambil.

Di sini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan secara spesifik menggunakan metode studi kasus yang merupakan turunan dari metode kualitatif tersebut. Kemudian pada bagian teknik pengumpulan data akan dielaborasi mengenai penggolongan jenis data sesuai dengan sumber-sumber yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dimana akan dijelaskan bahwa penulis menggunakan data sekunder dibandingkan data primer dan juga dielaborasi bagaimana data tersebut dikumpulkan.

Selanjutnya yang terakhir ialah teknik analisis data dimana akan menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan merupakan data yang valid, memastikan data berasal dari sumber ternama dan terpercaya.

Bab IV : Bab ini berfokus pada pembahasan dan analisis data dengan menggunakan kerangka teori serta konsep yang telah ditentukan. Penjelasan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tema atau sub-bab. Sub-bab atau tema ini dijabarkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pada bagian ini penulis juga akan fokus membahas secara komprehensif terkait studi kasus mengenai *QRIS Cross-Border* yang menjadi metodologi dari penelitian topik ini serta menyimpulkan hasil dari hipotesa-hipotesa, faktor atau indikasi yang dibahas untuk mendukung penelitian ini, yaitu misalnya apakah *QRIS Cross-Border* yang merupakan upaya diplomasi Indonesia dalam transformasi bidang keuangan digital di ASEAN berhasil diimplementasikan dan sejauh apa dampak dari implementasi *QRIS Cross-Border* tersebut dalam memulihkan dan meningkatkan angka atau keunggulan UMKM di ASEAN terutama dalam mendukung pembangunan ASEAN terutama tujuan dari *AEC Blueprint 2025*.

Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan kritik penulis terhadap topik pembahasan ini. Penulis juga akan mengelaborasi terkait manfaat apa yang dapat dikontribusikan oleh penelitian ini baik dari segi manfaat praktis, akademik serta dari segi kebijakan pemerintah.

Bab V : Bagian ini merupakan bagian kesimpulan dan rekomendasi atau saran.